KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bantuan PIP di Papua, banyak siswa tak terdaftar penerima
Tanggal : Jumat, 10 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Bantuan PIP Di Papua

Banyak Siswa Tak Terdaftar Penerima

ANGGOTA Komisi X DPR Sabam Sinaga mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi pendidikan di Papua, khususnya Provinsi Papua Pegunungan. Sabam melihat kurangnya tenaga pendidik, sarana prasarana sekolah, hingga rendahnya angka partisipasi pendidikan.

Kondisi pendidikan di Bumi Cendrawasih, lanjutnya, secara umum masih jauh tertinggal dibandingkan dengan rata-rata nasional. Rata-rata lama sekolah di Papua Pegunungan hanya sekitar 4,8 tahun, sementara nasional mencapai lebih dari 8 tahun. Itu berarti, perlu ada intervensi serius untuk memperbaiki kondisi ini.

"Kami melihat langsung kondisi nyata di lapangan. Banyak sekolah kekurangan guru dan fasilitas, sementara minat anak-anak untuk melanjutkan sekolah juga belum tinggi," ujar Sabam dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).

Dalam kunjungan kerja Komisi X ke wilayah itu Senin (6/10/2025), Sabam dan rekan-rekannya meninjau Yayasan Pendidikan PGI Napua Wamena. Di sekolah tersebut, sebagian besar guru masih berstatus sukarelawan tanpa dukungan tenaga pengajar tetap. Kondisi ini memperlihatkan betapa beratnya tantangan pendidikan di wilayah pedalaman Papua.

"Ini harus menjadi perhatian serius, karena tanpa tenaga pengajar tetap yang memadai, kualitas pendidikan sulit ditingkatkan," jelasnya.

Selanjutnya, dia juga menemukan sejumlah kendala administratif, seperti Data Pokok Pendidikan (dapodik) yang tidak sinkron. Itu menyebabkan banyak siswa tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Dia meminta ada pembenahan, agar bantuan pendidikan tepat sasaran. "Ini persoalan serius yang harus dibenahi agar kebijakan afirmatif pemerintah benar-benar menjangkau mereka yang berhak," tegas Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Senada, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyadari masih ada anak-anak sekolah yang belum bisa didukung bantuan operasional atau beasiswa PIP. Selain itu, mereka juga tidak mendapat fasilitas lainnya karena data dapodik yang tidak sinkron.

Kata dia, semua pihak harus segera mencari solusi terkait masalah tersebut. Sehingga anak-anak yang membutuhkan bisa mendapatkan sentuhan yang lebih serius lagi.

"Semua orang di seluruh Indonesia memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, termasuk di Papua Pegunungan," katanya.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Hetifah memastikan seluruh aspirasi dan masukan dari masyarakat serta Pemda Papua Pegunungan akan ditindaklanjuti. Dia menegaskan, akan melakukan langkah konkret dalam bidang regulasi, anggaran, dan advokasi antar-kementerian.

"Kami juga akan menyampaikan pesan dan aspirasi dari masyarakat Papua Pegunungan kepada kementerian dan lembaga lainnya agar jadi pertimbangan serius dalam pengambilan kebijakan," ujar anggota Fraksi Golkar itu.

Dia bilang, Komisi X DPR akan memperjuangkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Papua Pegunungan melalui kebijakan afirmatif. Antara lain dengan peningkatan fasilitas, pemerataan tenaga pengajar, dan dukungan terhadap pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia. ■ PYB